

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2018



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP)**

Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Tahun 2018

31 Desember 2018

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan.....	2
BAB II	RENCANA KERJA dan PERJANJIAN KERJA	11
	2.1. Rencana Strategik Kejaksaan Republik Indonesia 2015 - 2019	11
	2.1.1. Visi	11
	2.1.2. Misi.....	11
	2.1.3. Tujuan.....	12
	2.1.4. Sasaran.....	15
	2.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2013 - 2017.....	17
	2.3. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	21
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	25
	3.1. Pencapaian Sasaran	25
	3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018	26
	3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2018	43
BAB IV	PENUTUP	45
	4.1. Kesimpulan	45
	4.2. Saran-Saran	46
LAMPIRAN I	RENCANA STRATEGIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 – 2019	48
LAMPIRAN II	RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018	53
LAMPIRAN III	PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018	54

Ikhtisar Eksekutif

Dengan berakhirnya Tahun Kerja 2018, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Kewajiban Setiap Instansi Pemerintah untuk Melaporkan Akuntabilitas Kinerjanya dan sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor : 135 / M.PAN / 9 / 2004 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sekaligus guna memenuhi Surat Edaran Kementerian MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2010.

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Instansi Pemerintah, menggambarkan bahwa Pemerintah mempunyai tekad yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan sejalan dengan tuntutan di era globalisasi dan reformasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) khususnya dibidang penegakan hukum.

Prioritas RPJPN 2005-2025 Tahap III yang diturunkan dalam RPJMN 2015-2019 (RPJMN Tahap III) yaitu memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia di segala bidang dengan menekankan kesadaran dan penegakan hukum dan tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum, penegakkan Hak Asasi Manusia serta kelanjutan Penataan Sistem Hukum Nasional. Peranan pembangunan hukum dalam mendukung terwujudnya pembangunan nasional termasuk dalam posisi yang sangat sentral mengingat pembangunan hukum selalu terkait dengan pembangunan bidang-bidang

lainnya (bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan kemanan serta politik) karena apabila hukum dapat ditegakkan maka akan ada kepastian hukum secara optimal.

Untuk menciptakan penegakan hukum yang baik maka dibutuhkan peran serta aparaturnya penegak hukum dari lembaga penegak hukum yang ada. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum dan mempunyai peranan penting sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu pengayom masyarakat yang melayani di bidang penegakan hukum secara akuntabel, transparan melalui laporan akuntabilitas yang baik sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum dan perikeadilan mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum, utamanya dalam pelaksanaan penuntutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis dan beberapa hal yang perlu perbaikan dalam rangka menyelaraskan dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal dan internal di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk itu, seluruh program kerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2018 dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap III Tahun 2015- 2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja), serta Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Realisasi Belanja Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tahun 2018 yang anggarannya sebesar Rp.13.796.024.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah) terserap sebesar 95,74 % atau sebesar Rp.13.208.399.035,- (tiga belas milyar dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) dengan capaian kinerjanya didasarkan pada tujuan, sasaran strategis Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai Lembaga pemerintah yang berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum utamanya dalam pelaksanaan penuntutan di wilayah hukum yang meliputi seluruh Kota Yogyakarta.

Dalam rangka memenuhi amanat INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kejaksaan Negeri Yogyakarta bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pencapaian kinerja. Kejaksaan yang bersih, akuntabel dan transparan pada seksi-seksi yang terdiri dari Sub Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta tahun 2018 dibandingkan dengan target (dalam persen) dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Selama tahun 2018 Sub Bagian Pembinaan telah mengelola anggaran Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2018 sebesar Rp.13.796.024.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah). Dengan realisasi belanja per akhir tahun 2018 sebesar Rp.13.208.399.035,- (tiga belas milyar dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) atau terserap sebesar 95,74 %. Selain itu Sub Bagian Pembinaan juga telah menyetorkan penerimaan PNPB Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebesar Rp.2.599.582.182,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau sebesar 1.093,67 % dari estimasi penerimaan sebesar Rp.237.693.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), demikian juga dalam rangka pembenahan sumber daya manusia, Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah mengirimkan personil baik Jaksa maupun Tata Usaha (TU) untuk mengikuti diklat-diklat. Dalam tahun 2018 Sub Bagian Pembinaan juga telah melaksanakan kegiatan untuk program Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu pengadaan Genset 100 KVA dan rehab pagar kantor dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 400.168.000,- (98,56 %).
2. Seksi Intelijen selama tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan Operasi Intelijen dalam bentuk Penyelidikan (LID) sebanyak 1 (satu) kegiatan (pelaksanaan 100% dari target), kegiatan Penerangan Hukum (Penkum) sebanyak 2 (dua) kegiatan (200%), kegiatan Penyuluhan Hukum program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebanyak 9 (sembilan) kegiatan (225%). Dalam rangka mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan nasional di tingkat daerah, Tim Pengawal dan Pengamanan

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Yogyakarta juga telah melaksanakan kegiatan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali (350%).

3. Seksi Tindak Pidana Umum selama tahun 2018 telah menyelesaikan perkara tahap pra penuntutan sebanyak 346 perkara (231%), penuntutan sebanyak 406 perkara (203%) dan eksekusi atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak 363 perkara (182%).
4. Seksi Tindak Pidana Khusus selama tahun 2018 sudah melaksanakan Penyelidikan sebanyak 2 (dua) kasus (200%), Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Khusus lainnya nihil, Penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1 (satu) perkara (25%), Eksekusi Pidana Badan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 7 (tujuh) terpidana (350%), Jumlah Pendapatan dari Eksekusi Denda Perkara, Uang Pengganti, Uang Rampasan dan Biaya Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak Rp. 404.662.019,- (empat ratus empat juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan belas rupiah).
5. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan penanganan perkara Datun (Litigasi) sebanyak 5 (lima) Perkara, penanganan perkara Datun (Non Litigasi) sebanyak 13 (tiga belas) perkara (260%) sedangkan Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis telah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) perkara (75%).
6. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan merupakan struktur jabatan baru berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Perubahan Atas Perja No: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dalam tahun 2018, Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah melakukan Pelantikan Jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan pada tanggal 11 Juli 2018. Kegiatan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 2 (dua) kali, Pemeliharaan Barang Bukti yang dititipkan di Rupbasan dan telah menyetorkan Uang Rampasan Negara dengan total sekitar Rp.19.690.000,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disamping keberhasilan yang dicapai Kejaksaan Negeri Yogyakarta, kita mengakui bahwa masih ada hal-hal yang belum tercapai secara optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta ini bertujuan untuk memberikan

gambaran capaian kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kejaksaan dimana Kejaksaan Negeri Yogyakarta harus mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya serta langkah antisipatif untuk memperbaiki kegagalan dan kelemahan tersebut dimasa yang akan datang.

Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta ini menjadi penting pula sebagai barometer untuk mengukur dan mengevaluasi sampai sejauhmana *outcome* (hasil) maupun pencapaian sasaran yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2018 dengan menyajikan data secara jujur, objektif dan akurat dengan segala kekurangan dan kelemahan yang belum berhasil diatasi sehingga menjadi tantangan untuk dapat diperbaiki ditahun mendatang.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

UMBU LAGE WOLEKA, S.H.

Jaksa Utama Pratama NIP.19621110 198903 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada

Inpres RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-690/A/JA/12/2001 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia.

1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan

Dalam susunan ketatanegaraan, Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Kejaksaan R.I., mempunyai perangkat satuan kerja di daerah yaitu Kejaksaan Negeri sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum.

Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu satuan kerja di daerah dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang ditunjuk oleh Jaksa Agung RI. dan bertanggung jawab secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung RI. Kejaksaan Negeri merupakan institusi pelaksana kekuasaan negara dalam menjalankan penegakan hukum khususnya dibidang penuntutan, dimana semua aparatnya merupakan satu kesatuan (*een en ondelbaar*) yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dalam *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), Kejaksaan juga mempunyai peran yang strategis dalam upaya penegakan hukum. Posisi Kejaksaan menjadi poros sekaligus sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Selain itu Kejaksaan juga sebagai pengendali proses perkara, sebab pada institusi Kejaksaanlah adanya kewenangan untuk dapat menentukan apakah suatu kasus / perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana dan beban pembuktian pada publik.

Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang setelah mendapat SKK (Surat Kuasa

Khusus) baik sebagai Tergugat maupun Penggugat untuk mewakili kepentingan Pemerintah didalam maupun diluar Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat 3 (tiga) tugas utama / wewenang yang di miliki Kejaksaan yaitu :

1. Di bidang pidana :

- melakukan penuntutan;
- melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU;
- melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara :

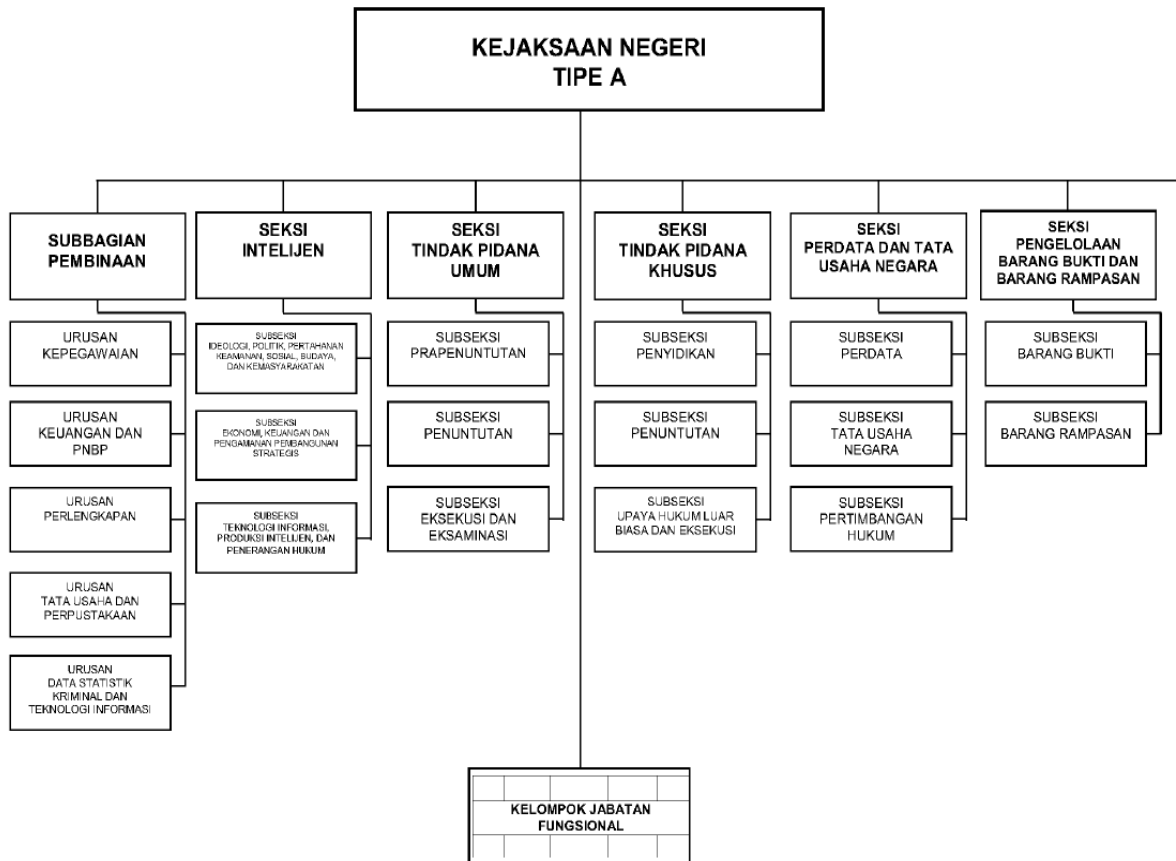
Mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang setelah mendapat SKK (Surat Kuasa Khusus) baik sebagai Tergugat maupun Penggugat untuk mewakili kepentingan pemerintah didalam maupun diluar Pengadilan.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
- penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa

Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :



Adapun nama-nama pejabat Eselon III dan IV yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatannya dalam Tahun Anggaran 2018, yaitu :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Dijabat oleh : ARIEF SYAH MULIA SIREGAR, S.H.; M.H. s/d 8 Agustus 2018 dan dilanjutkan oleh UMBU LAGE WOLEKA, S.H.

1. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina Aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;

2. melakukan dan atau mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakkan hukum hukum dan keadilan baik preventif maupun reforestif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah Hukum Kejari yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan & kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
3. melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan, Pemeriksaan tambahan, Penuntutan, Eksekusi, dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Jaksa Agung;
4. melakukan mengkoordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyidikan, penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
5. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar, meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu keterlibatan umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
6. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, BUMN, BUMD di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
7. membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
8. bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejari.

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINA

Dijabat oleh : MADYANTI RETNO WULANDARI, S.H.; M.H.

1. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi.
2. melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

3. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan integritas kepribadian aparat kejaksaan di daerah hukumnya;
4. melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

KEPALA SEKSI INTELIJEN

Dijabat oleh : BAMBANG TEJO MANIKMOYO, S.H. s/d 13 Desember 2018 dan dilanjutkan oleh SUWONO, S.H.

1. perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
2. melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
3. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektor lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
4. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
5. pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
6. mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana,

maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;

7. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
8. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
9. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
10. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat,

pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;

11. pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
12. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
13. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Dijabat oleh : WISNU WARDHANA, S.H. s/d 10 April 2018 dan dilanjutkan oleh JOKO WURYANTO, S.H., M.H.

1. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
3. pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadmintrasiannya;
4. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
5. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
6. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan;

7. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum;
8. pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan.

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Dijabat oleh : EVAN SATRYA, S.H.; M.H. s/d 1 Maret 2018 dan dilanjutkan oleh
ADHAWAN HARI, S.H., M.H.

1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;
3. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat, dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;
4. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;
5. penyiapan bahan saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;
6. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pada seksi tindak pidana khusus.

KEPALA SEKSI PERDATA & TATA USAHA NEGARA

Dijabat oleh : SARWO EDI, S.H. s/d 27 Agustus 2018 dan dilanjutkan oleh
MUHAMMAD ANDY KURNIAWAN, S.H., M.H.

1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
3. pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
4. pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan

- perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;
5. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
 6. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
 7. pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
 8. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan;
 9. menyiapkan bahan dan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

Dijabat oleh : MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN, S.H.; M.H. sejak 11 Juli 2018

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan progam kerja;
2. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
3. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan dan pengamanan;
4. Penyipian pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
5. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

BAB II

RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Strategik Kejaksaan Republik Indonesia 2015 - 2019

2.1.1. Visi

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia

2.1.2. Misi

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdatadan Tata Usaha Negara, serta meningkatkan kegiatan Intelijen penegakan hukum secara modern, berintegritas, profesional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum
2. Mewujudkan peran Kejaksaan RI dalam hubungan Internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara
3. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan RI, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (blue-print) pembangunan aparatur Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI)

5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KejaksaanRI yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

2.1.3. Tujuan

Masing-masing misi yang telah ditetapkan mempunyai tujuan, yaitu :

1. Tujuan dalam misi ke-1
 - a. Menyusun dan melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) penyelesaian perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisien, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja dapat lebih optimal.
 - b. Meningkatkan tertib administrasi perkara tindak pidana umum perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pidana khusus lainnya, perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, termasuk kegiatan penyelidikan Intelijen dalam penanganan kasus secara baik, akurat, tertata rapi, dan akuntabel.
 - c. Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat.
 - d. Meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi, serta mengoptimalkan pelaksanaan penyitaan untuk pemulihan / penyelamatan kekayaan negara yang telah diselewengkan oleh para pelaku tindak pidana korupsiserta melakukan pencegahan timbulnya tindak pidana korupsi.
 - e. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) dari hasil penanganan perkara baik terkait dengan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, serta pelaksanaan penegakan

hukum oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal Pembayaran Uang Pengganti (PUP).

- f. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah / BUMN / BUMD, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Meningkatkan kualitas hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan.
- h. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Tujuan dalam misi ke-2

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, termasuk dalam proses kenaikan gaji berkala dan hak-hak keuangan pegawai lainnya, serta kecepatan dan keakuratan dalam penyajian data kepegawaian serta tata persuratan.
- b. Meningkatkan pengkajian, penelitian dan pengembangan, serta kerjasama hukum yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kejaksaan, terutama dalam upaya penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan terhadap semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.

3. Tujuan dalam misi ke-3

- a. Meningkatkan pelaksanaan pelaporan kinerja secara akuntabel, transparan, tepat waktu, akurat dan taat azas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pelaksanaan operasional SIMKARI II untuk mendukung program quickwins guna pengimplementasian salah satu program reformasi

birokrasi dalam penyajian data dan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat.

- c. Meningkatkan pelayanan publik dalam hal penyebaran informasi, dan penerimaan pengaduan masyarakat baik terkait dengan laporan penanganan perkara / kasus maupun pelaksanaan kinerja aparaturnya.

4. Tujuan dalam misi ke-4

- a. Pengimplementasian, evaluasi dan pengkajian atas organisasi Kejaksaan yang telah di ubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan organisasi Kejaksaan, dan penyempurnaan ketatalaksanaan (business process) berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang baru.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins melalui pembenahan sistem informasi manajemen yang berbasis Teknologi Informasi (TI) diseluruh satuan kerja Kejaksaan.
- c. Penyusunan cetak biru (blue-print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang 2025.
- d. Penyusunan dan pengimplementasian program Reformasi Birokrasi Kejaksaan.
- e. Meningkatkan pengelolaan Keuangan dengan menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan.
- f. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan, terutama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum.
- g. Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran tunjangan Kinerja (remunerasi).

5. Tujuan dalam misi ke-5

- a. Menyusun dan memperbaiki serta mengimplementasikan sistem manajemen kepegawaian guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan.

- b. Meningkatkan kualitas seleksi dalam penerimaan (rekrutmen) pegawai, PPPJ, peserta diklat, promosi dan mutasi pegawai Kejaksaan.
- c. Meningkatkan disiplin kerja dan efektifitas kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur Kejaksaan, baik yang bersifat diklat teknis, fungsional, diklat penjejang maupun diklat lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang terutama dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan penegakan hukum.

2.1.4. Sasaran

Beberapa sasaran pembangunan nasional terkait dengan kinerja Kejaksaan, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2015 – 2019 yang berpedoman pada RPJMN 2015 – 2019, yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan melalui program dan kegiatannya terutama yang merupakan “core business“ Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum. Untuk melaksanakan seluruh program-programnya lebih dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus (terutama perkara tindak pidana korupsi) yang menjadi prioritas utama kebijakan pimpinan Kejaksaan.

Dalam upaya peningkatan kinerja Kejaksaan telah menetapkan 15 (lima belas) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya penanganan perkara Pidum, Pidsus dan Pelanggaran HAM Berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan.
2. Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
3. Meningkatnya kepercayaan klien Kejaksaan RI terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI.
4. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata.
5. Meningkatnya kedisiplinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan RI atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.

6. Tersedianya SDM Kejaksaan RI yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai kebutuhan.
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan RI.
9. Terwujudnya Kejaksaan yang modern berbasis teknologi informatika.
10. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI.
11. Meningkatnya kepercayaan aparatur Kejaksaan RI terhadap Organisasi Kejaksaan RI.
12. Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan RI.
13. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
14. Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan RI.
15. Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan RI.

Dari beberapa sasaran strategis Kejaksaan di atas, yang terkait dengan kinerja Kejaksaan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 – 2019 yang menjadi prioritas nasional, yang pada tahun 2018 terdapat perubahan program antara lain :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI.
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan.
5. Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.
6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum.
7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Program-program tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Renstra Kejaksaan periode 2015 – 2019 sekaligus untuk terwujudnya visi melalui misi yang telah ditetapkan. Dan juga, dalam kesempatan ini akan disampaikan secara lebih menyeluruh tentang pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun 2018, sehingga bahan yang dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berupa

gambaran pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Dalam laporan ini akan disajikan senengi antara rencana kinerja (performance plan) dibandingkan dengan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan parameter yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama. Analisa dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tersebut akan mengungkapkan pula kekurangan dan kegagalan yang belum berhasil dicapai.

2.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2013 - 2017

2.2.1. SUB BAGIAN PEMBINAAN

A. Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan

No	Uraian	Tahun					Ket
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Surat Masuk Biasa	3.814	4.092	3.976	3.352	3.184	Surat
2	Surat Masuk Rahasia	213	181	161	199	119	Surat
3	Surat Keluar Biasa	3.363	4.086	4.015	3.380	2.951	Surat
4	Surat Keluar Rahasia	235	320	316	464	385	Surat
5	Surat Keluar Keputusan	25	25	32	47	31	Surat
6	Surat Keluar Perintah	2.391	2.323	2.288	2.127	2.264	Surat
7	Surat Keluar Penetapan	704	652	471	407	394	Surat

B. Urusan Kepegawaian

No	Uraian	Tahun					Ket
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Jaksa	27	21	21	29	27	Orang
	Tata Usaha	64	59	59	60	59	Orang
	JUMLAH	91	80	80	89	86	Orang
2.	Mutasi masuk terdiri dari	6	5	9	12	1	Orang
3.	Mutasi keluar terdiri dari	7	12	6	4	3	Orang
4.	Memasuki usia pensiun	1	-	-	2	1	Orang
5.	Pendidikan/Penataran/Pelatihan	8	13	7	4	6	Orang
6.	Kenaikan Pangkat	30	13	16	9	34	Orang
7.	Kenaikan Gaji Berkala	44	34	48	36	56	Orang

C. Urusan Perlengkapan

No	Tahun	Uraian
1.	2013	Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor; Pembelian dan pendistribusikan ATK dan ART; Transfer masuk dari Kejaksaan Tinggi Kendaraan Dinas Roda Empat (Toyota Velos) dan 2 buah mesin scanner merk Fujitsu.
2.	2014	Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor; Pembelian dan pendistribusikan ATK dan ART.
3.	2015	Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor; Pembelian dan pendistribusikan ATK dan ART; Pengadaan Sarana Prasarana kantor berupa 10

		unit pengadaan data dan komunikasi berupa laptop, printer dan UPS , Sarana Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa pendingin ruangan/ac sejumlah 6 unit dan sarana gedung bangunan berupa pembangunan ruangan tahanan anak dan perempuan seluas 20 m ² .
4.	2016	Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor; Pembelian dan pendistribusikan ATK dan ART; Pembuatan Gudang, Taman, Jaringan Internet, Banner 5M, Neon Box, Tulisan Tri Krama Adhyaksa dan Ruang Diversi; Penghapusan Barang Inventaris berupa peralatan dan mesin yang rusak dengan dilelang pada tanggal 14 Desember 2016 dan laku sebesar Rp.2.610.010,-.
5.	2017	Pembelian dan pendistribusikan ATK dan ART; Pemeliharaan kendaraan dinas berupa pengecatan Bus Tahanan; Pengecatan pagar kantor dan dinding bagian luar kantor dengan warna putih; Belanja Modal Penambahan Daya Jaringan Listrik dari 11.000 KVA ke 33.000 KVA; Penghapusan Barang Inventaris berupa peralatan dan mesin rusak yang sudah laku dilelang dari aplikasi SIMAK.

D. Urusan Daskrimti

No	Tahun	Uraian
1.	2013	Entri dan Update Data Kepegawaian, Perkara Pidum, Pidsus, Intelijen dan Datun lewat Aplikasi Simkari.
2.	2014	Entri dan Update Data Kepegawaian, Perkara Pidum, Pidsus, Intelijen dan Datun lewat Aplikasi Simkari.
3.	2015	Entri dan Update Data Kepegawaian, Perkara Pidum, Pidsus, Intelijen dan Datun lewat Aplikasi Simkari.
4.	2016	Entri dan Update Data Kepegawaian, Perkara Pidum, Pidsus, Intelijen dan Datun lewat Aplikasi Simkari. Pelaksanaan Aplikasi Simadu di Wilayah Kejaksaan Tinggi dan Negeri se-DIY.
5.	2017	Entri dan Update Data Kepegawaian, Perkara Pidum, Pidsus, Intelijen dan Datun lewat Aplikasi Simkari. Pelaksanaan Aplikasi Simadu di Wilayah Kejaksaan Tinggi dan Negeri se-DIY.

E. Urusan Keuangan dan PNPB

No	Tahun	Uraian DIPA				Realisasi Anggaran
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Anggaran	
1.	2013	4.949.192.000	3.194.867.000	1.979.315.000	8.144.059.000	91,45 %
2.	2014	5.822.082.000	2.40.540.000	-	8.062.622.000	91,43 %
3.	2015	5.938.448.000	2.450.874.000	-	8.539.322.000	113,45 %
4.	2016	6.857.668.000	2.549.859.000	-	9.407.527.000	95,49 %
5.	2017	7.127.208.000	2.057.320.000	45.000.000	9.229.528.000	93,68 %

Penyetoran Hasil Dinas :

No	Tahun	Total Penerimaan PNPB	Penerimaan Tipiring
1.	2013	Rp. 1.424.654.896,-	Rp. 144.382.500,-
2.	2014	Rp. 2.134.573.988,-	Rp. 194.286.000,-
3.	2015	Rp. 1.890.878.847,-	Rp. 270.659.000,-
4.	2016	Rp. 1.763.447.450,-	Rp. 353.651.000,-
5.	2017	Rp. 2.083.558.938,-	Rp. 193.680.000,-

2.2.2. SEKSI INTELIJEN

No	Tahun	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	2013	Pam/Gal	3	3	100 %
		Penyelidikan Tertutup (<i>Surveillance</i>)	1	1	100 %
		Pelacakan Aset	3	3	100 %
		Penerangan Hukum	3	3	100 %
		Peningkatan Jaringan Masyarakat anti KKN	1	1	100 %
2.	2014	Lid/Pam/Gal	3	3	100 %
		Pelacakan Aset	3	3	100 %
		Penerangan Hukum	2	2	100 %
		Pers Gathering	2	2	100 %
		Peningkatan Jaringan Masyarakat anti KKN	2	2	100 %
3.	2015	Lid/Pam/Gal	3	3	100 %
		Pelacakan Aset	3	3	100 %
		Penerangan Hukum	2	2	100 %
		Pers Gathering	1	1	100 %
		Peningkatan Jaringan Masyarakat anti KKN	2	2	100 %
4.	2016	Lid/Pam/Gal	1	1	100 %
		Pelacakan Aset	1	1	100 %
		Penerangan Hukum	2	2	100 %
		Peningkatan Jaringan Masyarakat anti KKN	1	1	100 %
5.	2017	Lid/Pam/Gal	1	1	100%
		Pelacakan Aset	2	2	100%
		Penerangan Hukum	4	8	200%
		Peningkatan Jaringan Masyarakat anti KKN	6	23	383%

2.2.3. SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

No	Tahun	Tahap	Target (perkara)	Realisasi (perkara)	Capaian
1.	2013	Pra Penuntutan	313	391	124,9 %
		Penuntutan	313	332	106,1 %
		Eksekusi	274	401	146,4 %
2.	2014	Pra Penuntutan	279	356	127,6 %
		Penuntutan	279	470	168.5 %
		Eksekusi	423	483	114.4 %

3.	2015	Pra Penuntutan	300	354	118,0 %
		Penuntutan	300	413	137,7 %
		Eksekusi	300	436	145,3 %
4.	2016	Pra Penuntutan	300	420	140 %
		Penuntutan	300	353	117,7 %
		Eksekusi	300	353	117,7 %
5.	2017	Pra Penuntutan	180	332	184,4 %
		Penuntutan	180	405	225 %
		Eksekusi	180	406	225,5 %

2.2.4. SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

No	Tahun	Tahap	Target (perkara)	Realisasi (perkara)	Capaian
1.	2013	Penyelidikan	3	1	33,3 %
		Penyidikan	3	3	100 %
		Penuntutan	3	4	133,3 %
		Eksekusi	3	4	133,3 %
		Upaya Hukum	3	6	200 %
2.	2014	Penyelidikan	3	3	100 %
		Penyidikan	3	3	100 %
		Penuntutan	3	8	266,7 %
		Eksekusi	3	5	166,7 %
		Upaya Hukum	3	3	100 %
3.	2015	Penyelidikan	3	3	100 %
		Penyidikan	3	3	100 %
		Penuntutan	3	8	266,7 %
		Eksekusi	3	5	166,7 %
		Upaya Hukum	3	3	100 %
4.	2016	Penyelidikan	3	2	66,7 %
		Penyidikan	3	1	33,3 %
		Penuntutan	4	2	50 %
		Eksekusi	4	9	225 %
		Upaya Hukum	3	2	66,7 %
5.	2017	Penyelidikan	1	1	100 %
		Penyidikan	1	1	100 %
		Penuntutan	4	1	25 %
		Eksekusi	1	4	400 %
		Upaya Hukum	6	10	166,7 %

2.2.5. SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

No	Tahun	Uraian	Target (perkara)	Realisasi (perkara)	Capaian
1.	2013	Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN	2	9	450 %
2.	2014	Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN	2	10	450 %
3.	2015	Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN Litigasi	2	4	200 %
		Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN Non Litigasi	2	19	950 %
		Pos media informasi dan pelayanan hukum gratis	12	12	100 %
4.	2016	Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN Litigasi	-	3	-
		Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN Non Litigasi	2	11	550 %
		Pos media informasi dan pelayanan hukum gratis	12	12	100 %
5.	2017	Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN Litigasi	-	2	-
		Penanganan & Penyelesaian Perkara DATUN Non Litigasi	3	26	867 %
		Pos media informasi dan pelayanan hukum gratis	12	12	100 %

2.3. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan pokok dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 dilaksanakan dalam 6 (enam) Program dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sasaran. Yang terdiri dari Kegiatan Tupoksi (kegiatan yang berdasarkan tugas pokok pada bidang yang bersangkutan) dan Kegiatan Prioritas (kegiatan yang menjadi perhatian utama sebagai lembaga penegak hukum), dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI.

Program dilaksanakan oleh Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Kegiatan yang ada pada program ini adalah : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Sasaran yang ingin dicapai adalah Pelaksanaan Koordinasi Dengan Semua Satuan Kerja Dalam Rangka Penyiapan Rumusan Rencana dan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan.
- Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan target 1 (satu) Layanan
 - 2) Layanan Perkantoran dengan target 12 (dua belas) Layanan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Program dilaksanakan oleh Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Kegiatan yang ada pada program ini adalah : Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- Sasaran yang ingin dicapai adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah.
- Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Sarana dan Prasarana Kejari (Pengadaan Geset dan Rehab Pagar Kantor).

3. Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan (Lid/Pam/Gal) Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Ada 2 (dua) Kegiatan yang ada pada program ini, yaitu :
 - a) Penanganan Lid/Pam/Gal di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
 - Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Lid/Pam/Gal yang Dilaksanakan.
 - Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Laporan Hasil Kegiatan Lid/Pam/Gal Kasus Intelijen di Kejari dengan target 1 (satu) Laporan.
 - 2) Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan target 3 (tiga) Laporan;
 - 3) Laporan hasil kegiatan Pelacakan Aset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan target 1 (satu) laporan.

b) Penerangan dan Penyuluhan Hukum.

- Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum dengan target 2 (dua) Kegiatan;
 - 2) Kelompok Masyarakat dan Sekolah yang diberi Penyuluhan Hukum / Jaksa Masuk Sekolah dengan target 4 (empat) Kegiatan;
 - 3) Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan target 2 (dua) Kegiatan;
 - 4) Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejari dengan target 6 (enam) Kegiatan.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum.

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Kegiatan yang ada pada program ini adalah : Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel.
- Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri dengan target 150 (seratus lima puluh) Perkara.
 - 2) Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri dengan target 200 (dua ratus) Perkara.
 - 3) Pengendalian penggunaan Upaya Hukum, Eksaminasi dan pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri dengan target 200 (dua ratus) Perkara.

5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Kegiatan yang ada pada program ini adalah : Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel yang Dilaksanakan Oleh Jajaran Kejaksaan.
- Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri dengan target 1 (satu) Kasus.
 - 2) Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri dengan target 1 (satu) Perkara.
 - 3) Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dengan target 4 (empat) Perkara.
 - 4) Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dengan target 4 (empat) Perkara.
 - 5) Pelaksanaan Eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi / Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Negeri dengan target 1 (satu) Perkara.
 - 6) Pelaksanaan Eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi / Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Negeri dengan target 1 (satu) Perkara.

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Program ini dilaksanakan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Kegiatan yang ada pada program ini adalah : Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Indikator yang digunakan adalah :
 - 1) Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri (Non Litigasi) dengan target 5 (lima) Perkara.
 - 2) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis dengan target 12 (dua belas) Perkara.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja lembaga dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. *Output* merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh. Hasil kinerja yang diperoleh harus diukur sampai sejauhmana pencapaian sasaran melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kejaksaan tahun 2017. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut dapat di ukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.

3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Untuk melaksanakan kerjanya, Kejaksaan Negeri Yogyakarta didukung oleh 6 (lima) bidang yaitu : Sub Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata & Tata Usaha Negara dan Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan. Dalam upaya pencapaian kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2018 yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 (BAB II Poin.3) terdapat 6 (enam) Program dengan 7 (tujuh) sasaran strategis yang dilaksanakan masing-masing bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.2.1. SUB BAGIAN PEMBINAAN

Sasaran ke 1

"Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100 %

Sasaran ke 2

"Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah.	Sarana dan Prasarana Kejari (Pengadaan Genset dan Rehab Pagar Kantor)	2 Paket	2 Paket	100 %

1) Kinerja pada Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan :

a. Mengelola sirkulasi surat menyurat di lingkungan Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang meliputi pendistribusian surat masuk yang telah didisposisikan oleh pimpinan, pengiriman surat keluar, penggandaan dan pengarsipan baik surat masuk maupun keluar, dengan rincian sebagai berikut :

i.	Surat Masuk Biasa	: 3.571 Surat
ii.	Surat Masuk Rahasia	: 97 Surat
iii.	Surat Masuk Perintah	: 104 Surat
iv.	<u>Surat Masuk Keputusan</u>	<u>: 38 Surat</u>

Jumlah: 3.810 Surat Masuk

v.	Surat Keluar Biasa	: 2.586 Surat
vi.	Surat Keluar Rahasia	: 310 Surat
vii.	Surat Keluar Penetapan	: 392 Surat
viii.	Surat Keluar Perintah	: 2.280 Surat
ix.	<u>Surat Keluar Keputusan</u>	<u>: 35 Surat</u>

Jumlah: 5.603 Surat Keluar

b. Melaksanakan penyusunan dan pengiriman laporan-laporan yaitu Laporan Rapat Staf, Laporan Rapat Paripurna, Laporan Rapat Dinamika Kelompok, Laporan Bulanan per bidang, Laporan Semesteran Perpustakaan dan Laporan Tahunan LAKIP 2018.

c. Membuat jadwal Petugas Piket bagi para pegawai untuk menunjang pelaksanaan tugas keamanan dalam. Untuk tugas piket diluar jam kerja dilaksanakan oleh satpam dari pihak ke tiga (*outsourcing*).

d. Menerima kegiatan Inspeksi dan Pemantauan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan baik dari Kejaksaan Agung R.I. maupun dari Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.

e. Berhasil menambah koleksi bahan pustaka Perpustakaan sejumlah 20 (dua puluh) buah sehingga total berjumlah 3.525 pustaka.

f. Pemberian nomor indeks dan nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka yang baru sesuai Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-038/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

- g. Memelihara bahan pustaka yang sudah ada agar tidak rusak seperti pemberian kapur barus, perbaikan jilidan buku dan pemberian sampul plastik.
- h. Bahwa data kegiatan Perpustakaan Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - 1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang;
 - 2. Jumlah yang meminjam bahan pustaka Perpustakaan Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang;
 - 3. Jumlah bahan pustaka perpustakaan yang di pinjam sebanyak 44 (empat puluh empat) buku.

2) Kinerja pada Urusan Kepegawaian :

- a. Melengkapi data Kepegawaian dengan jumlah pegawai sampai pada tanggal 18 Desember 2018 sebanyak 86 orang, terdiri dari Jaksa sebanyak 25 orang dan Tata Usaha sebanyak 61 orang.
- b. Memproses Kenaikan Gaji Berkala bagi para pegawai sebanyak 30 orang.
- c. Memproses usulan Kenaikan Pangkat bagi para pegawai sebanyak 12 orang.
- d. Memproses administrasi pegawai sesuai ketentuan untuk Mutasi Keluar sebanyak 10 orang dan Mutasi Masuk sebanyak 11 orang.
- e. Memproses administrasi pegawai sesuai ketentuan untuk Diklat Pim IV sebanyak 1 Orang dan Diklat Aset Recovery sebanyak 1 orang.
- f. Memproses usulan penganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada para pegawai sebanyak 13 orang.
- g. Mengelola dana sosial yang diperoleh dari iuran para pegawai dengan cara potong gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.000,- diperuntukkan untuk pegawai yang mendapat musibah sesuai kesepakatan sebesar Rp. 250.000,- dan menyiapkan obat-obatan untuk P3K.
- h. Mengadakan santapan rohani bagi pegawai setiap satu bulan sekali.
- i. Melaksanakan kegiatan senam kesegaran Jasmani setiap hari Jumat selama Tahun 2018 sebanyak 37 kali.
- j. Kegiatan Koperasi yang bergerak dibidang Simpan Pinjam telah berbadan hukum sejak tahun 1991 dan berjalan lancar. Jumlah anggota sampai dengan 18 Desember 2018 sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang dan memiliki aset Rp.660.000.000,-

k. Melaksanakan kegiatan *In House Training* dalam rangka kegiatan pengembangan pegawai sebanyak 4 (empat) kegiatan.

3) Kinerja pada Urusan Keuangan

a. Mengelola Anggaran Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.13.796.024.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai	: Rp. 10.582.734.000,-
- Belanja Barang	: Rp. 2.807.290.000,-
- Belanja Modal	: Rp. 406.000.000,-
Jumlah	: Rp. 13.796.024.000,-

Dengan realisasi belanja per akhir tahun 2018 sebesar Rp.13.208.399.035,- (tiga belas milyar dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) atau terserap sebesar 95,74 %.

b. Menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara.

Dalam DIPA Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.237.693.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.2.599.582.182,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau sebesar 1.093,67 % dari estimasi penerimaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pend. sewa tanah, gedung & bangunan	: Rp. 2.665.628,-
2. Pend. ongkos perkara	: Rp. 21.147.500,-
3. Pend. penjualan Baran/hasil sitaan yg tlh ditetapkan Pengadilan	: Rp. 8.655.000,-
4. Pend. denda pelanggaran lalu lintas	: Rp. 1.768.448.000,-
5. Pend. denda hasil tindak pidana lainnya	: Rp. 437.098.500,-
6. Pend. Uang Pengganti Tipikor yg ditetapkan Pengadilan	: Rp. 209.534.554,-
7. Pend. Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang telah ditetapkan Pengadilan	: Rp. 152.033.000,-
JUMLAH	: Rp. 2.599.582.182,-

c. Menyetorkan Penerimaan Hasil Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ke Kas Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2018, penerimaan hasil tindak pidana ringan (Tipiring) pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebesar Rp 185.151.000,- (seratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

d. Penyelesaian Barang Rampasan dengan cara dilelang sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang Rampasan	No & Tgl Putusan	Nama Terpidana & Tindak Pidana	Perkiraan Harga	Rencana & Penyelesaian	Keterangan
1.	Televisi 14 inc merk Devatec	11/Pidsus-anak/2017/PN. Yyk tgl 02-05-2017	Tedi Yektiawan bin Supoyo / Pencurian	Rp.54.000,-	Lelang Tgl 6 Juni 2018.	Terjual Rp.181.000,-
2.	HP Asus Zenfone 2	201/Pidsus/2017/PN.Yyk tgl 02-09-2017	Dhika Tirta Wilaga / Cabul	Rp.54.000,-	Lelang Tgl 6 Juni 2018.	Terjual Rp.518.000,-
3.	HP Samsung warna hitam.	274/Pidsus/2017/PN.Yyk tgl 08-11-2017	Priyadi bin Hadi / Judi	Rp.9.000,-	Lelang Tgl 6 Juni 2018.	Terjual Rp.25.000,-
4.	SPM Honda AD-4705-AED	288/Pid.B/2017/PN.Yyk tgl 30-11-2017	Frido S, Dkk / Pencurian dgn kekerasan	Rp.6.988.000,-	Lelang Tgl 15 Nopember 2018.	Terjual Rp.7.000.000,-
5.	SPM Yamaha Mio AB-4506-MG	120/Pid.B/2018/PN.Yyk tgl 03-06-2018	M.Faris DS, Dkk/ Pencurian	Rp.104.000,-	Lelang Tgl 15 Nopember 2018.	Terjual Rp.891.000,-
6.	HP merk Polytron	47/Pid.B/2018/PN.Yyk tgl 28-03-2018	Sarwono / Judi	Rp.30.000,-	Lelang Tgl 15 Nopember 2018.	Terjual Rp.40.000,-

4) Kinerja pada Urusan Perlengkapan :

- a. Pembuatan Pos Satpam.
- b. Perkerjaan ruang kajari (penggantian wall paper dan kamar mandi).
- c. Pengadaan Genset 100 KVA dengan kontrak senilai Rp. 244.860.000,-.
- d. Rehap Pagar Kantor dengan kontrak senilai Rp. 155.308.000,-.
- e. Perbaiki sebagian Instalasi jaringan listrik.
- f. Pembuatan ruang Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barag Rampasan.
- g. Pemeliharaan mesin kendaraan Dinas meliputi, kendaraan dinas roda dua, kendaraan dinas roda empat dan bus tahanan.
- h. Pemeliharaan inventaris kantor dan sarana prasarana kantor.
- i. Pemeliharaan dan pengecatan rumah dinas jabatan.
- j. Pembuatan sumur resapan, perbaikan konblok halaman kantor, perbaikan sanitasi, pengecatan sebagian ruangan, pengecatan kusen jendela.
- k. Pembelian ATK dan ART
- l. Melaksanakan penetapan status BMN berupa Tanah dan Non Tanah.

5) Kinerja pada Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Daskrimti) :

- a. Melakukan entry data semua bidang secara rutin / berkala serta pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk mendukung tugas pokok dan

fungsi Kejaksaan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI(SIMKARI). Dengan rincian entri data tahun 2018 sebagai berikut:

- Informasi Kepegawaian : 20 update data;
- Perkara Pidana Umum : 272 entri data;
- Perkara Pidana Khusus : 4 entri data;
- Bahan Intelijen : 1 entri data;
- Perkara Perdata & TUN : 9 entri data.

- b. Membangun dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Tata Usaha (SEPATU) yang berbasis teknologi informasi terutama dalam pengelolaan persuratan dan perpustakaan untuk menggantikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMADU) yang sudah rusak atau offline.
- c. Membangun jaringan aplikasi Case Management System SIMKARI (CMS SIMKARI) pengadaan dari Pusdaskrimti Kejaksaan Agung RI agar siap digunakan mulai tahun 2019 dengan menempatkan 1 komputer di Sekretariat, 3 komputer di Seksi Pidum dan 1 komputer di Seksi Pidsus.
- d. Membangun portal website khusus informasi penanganan perkara Pidana Khusus di Kejari Yogyakarta dan penyampaian pengaduan masyarakat secara online dengan alamat <http://pidsus.kejari-yogyakarta.go.id>.
- e. Membangun jaringan aplikasi E-TILANG pengadaan dari Pusdaskrimti Kejaksaan Agung RI agar siap digunakan dengan menempatkan 3 komputer dan 1 laptop di Ruang Tilang Kejari Yogyakarta.

3.2.2. SEKSI INTELIJEN

Sasaran ke 3

"Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan yang Dilaksanakan"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan yang Dilaksanakan.	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen di Kejari.	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Laporan Hasil Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejari	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejari	1 Laporan	-	0%

Sasaran ke 4

"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	Kelompok masyarakat dan sekolah yang diberi penyuluhan hukum / jaksa masuk sekolah.	4 Kegiatan	8 Kegiatan	200%
	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	6 Kegiatan	18 Kegiatan	300%

Kinerja Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta selama tahun 2018 sebagai berikut :

✓ Kegiatan LID/PAM/GAL :

Melaksanakan kegiatan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelejen (Penyelidikan) Nomor : Prin.OPS-01/O.4.10/Dek.3/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 terkait permasalahan pada "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Koni Kota Yogyakarta Tahun 2017". Hasil dari Penyelidikan tersebut telah dilimpahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

✓ Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) :

1. Rapat Koordinasi Tim PAKEM dengan Penghayat Kepercayaan bertempat di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor : Print-1826/O.4.10/Dsp.5/10/2018 Tanggal 29 Oktober 2018.
2. Rapat Koordinasi Tim PAKEM dengan Penghayat Kepercayaan bertempat di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 November 2018 berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor : Print-2023/O.4.10/Dsp.5/11/2018 tanggal 26 November 2018.

3. Rapat Koordinasi Tim PAKEM dengan Penghayat Kepercayaan bertempat di Padepokan Paguyuban Hangudi Bawana Tata Lahir Batin pada tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor : Print-2097/O.4.10/Dsp.5/11/2018 tanggal 30 November 2018.
- ✓ Kegiatan Penerangan Hukum :
1. Bendahara SD se-Kota Yogyakarta bertempat di SD Lempuyangwangi Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Oktober berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor : Print-1665/O.4.10/L.2/10/2018 Tgl 1 Oktober 2018.
 2. Guru dan siswa SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-1747/O.4.10/L.2/10/2018 Tgl 15 Oktober 2018.
- ✓ Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah :
1. SMA Negeri 7 Kota Yogyakarta pada Tgl 1 Februari 2018 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-180/O.4.10/L.2/01/2018 Tgl 30 Januari 2018.
 2. SMP Negeri 16 Kota Yogyakarta pada Tgl 22 Februari 2018 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-284/O.4.10/L.2/02/2018 Tgl 20 Februari 2018.
 3. SMP Taman Dewasa Kota Yogyakarta pada Tgl 7 Mei 2018 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-785/O.4.10/L.2/05/2018 Tgl 4 Mei 2018.
 4. SMK Koperasi Kota Yogyakarta pada Tgl 17 Juli 2018 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-1273/O.4.10/L.2/07/2018 Tgl 13 Juli 2018.
 5. SMA Bopkri 1 Kota Yogyakarta pada Tgl 16-18 Juli 2018 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-1274/O.4.10/L.2/07/2018 Tgl 13 Juli 2018.
 6. SDN Pakel Kota Yogyakarta pada Tgl 17 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-1749/O.4.10/L.2/10/2018 Tgl 15 Oktober 2018.
 7. SDN Karangmulyo Yogyakarta pada Tgl 27 November 2018 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-2188/O.4.10/L.2/11/2018 Tgl 23 November 2018.
 8. SDN Tegalorejo 2 Yogyakarta pada Tgl 11 Desember 2018 berdasarkan surat perintah Nomor : Print-2189/O.4.10/L.2/12/2018 Tgl 7 Desember 2018.
- ✓ Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) :

1. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-05/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Renovasi Kantor Kecamatan Pakualaman dengan sumber dana APBD senilai Rp 3.260.000.000,-.
2. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-08/O.4.10/Set/03/2018 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Penyelesaian Gedung Inspektorat (Tahap 3) dengan sumber dana APBD senilai Rp 900.000.000,-.
3. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-09/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Renovasi Kantor Kelurahan Keparakan dengan sumber dana APBD senilai Rp 2.000.000.000,-.
4. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-10/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Renovasi SD Mendungan 2 dengan sumber dana APBD senilai Rp 1.100.000.000,-.
5. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-14/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Renovasi SMP Negeri 5 dengan sumber dana APBD senilai Rp 1.550.000.000,-.
6. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-03/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Pembangunan SAH Kelurahan Tegalorejo dengan sumber dana APBD senilai Rp 612.145.000,-.
7. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-06/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Pembangunan SAH Jalan Prawirotaman IV dengan sumber dana APBD senilai Rp 1.250.000.000,-.
8. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-02/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Rehabilitasi Saluran Irigasi Jl. Babaran dengan sumber dana APBD senilai Rp 13.999.500.000,-.

9. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-04/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Peningkatan Jalan KH. A. Dahlan (DAK) dengan sumber dana APBD senilai Rp 4.100.000.000,-.
10. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-12/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Pemeliharaan Jalan Sorosutan dengan sumber dana APBD senilai Rp 1.300.000.000,-.
11. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-01/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Peningkatan PJU Kampung Sektor 1,2,3, dan 4 dengan sumber dana APBD senilai Rp 1.850.000.000,-.
12. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-13/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Peningkatan PJU Lingkungan Sektor 1 & 4 dengan sumber dana APBD senilai Rp 1.100.000.000,-.
13. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-11/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Pemb. Sambungan Rumah & Saluran Pembawa Warungboto dengan sumber dana APBD senilai Rp 1.898.000.000,-.
14. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-07/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kel. Pringgokusuman dengan sumber dana APBD senilai Rp 853.714.000,-.
15. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-17/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terhadap Proyek Pengadaan Komputer (PC) dengan sumber dana APBD senilai Rp 4.752.000.000,-.
16. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-19/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terhadap Proyek Pengadaan Mesin Cetak dengan sumber dana APBD senilai Rp 525.000.000,-.
17. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-18/O.4.10/Set/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terhadap Proyek

Pengadaan Meja-Kursi Siswa dengan sumber dana APBD senilai Rp 1.421.000.000,-.

18. Berdasarkan surat perintah Nomor : Prin-24/O.4.10/Set/08/2018 tanggal 01 Agustus 2018 kegiatan di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terhadap Proyek Pekerjaan Penataan Kawasan Kotabaru dengan sumber Dana Keistimewaan Yogyakarta.

3.2.3. SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Sasaran ke 5

"Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana umum secara Cepat, Tepat dan Akuntabel"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana umum secara Cepat, Tepat dan Akuntabel.	Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan.	150 Perkara	346 Perkara	232 %
	Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam tahap Penuntutan.	200 Perkara	406 Perkara	203 %
	Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht</i>) yang berhasil dieksekusi.	200 Perkara	363 Perkara	182 %

1) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

Pada tahun 2018 Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta menargetkan dapat menyelesaikan 150 perkara dan dalam pelaksanaannya telah melebihi dari target. Dalam proses penanganan perkara tindak pidana umum telah mengacu kepada Sistem Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana umum sehingga penanganan perkara tindak pidana umum dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat. Rincian penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu sebagai berikut :

- Jumlah Perkara yang sudah di P-21 dan telah dilakukan Penuntutan sebanyak 346 perkara (232% dari target);
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum yang terbukti di Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkrachrt) yaitu sebanyak 406 perkara (203 % dari target);

- Jumlah Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum tetap (inkracht) yang berhasil dieksekusi sebanyak 363 perkara (182 % dari target).

2) Dalam Tahun Anggaran 2018 Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta berhasil melakukan penagihan hasil dinas sebesar Rp. 2.861.038.000,- Dengan rincian sebagai berikut :

- Denda Perkara Tilang	Rp. 2.192.230.000,-
- Biaya Perkara Tilang	Rp. 24.096.000,-
- Denda Perkara APB dan APS	Rp. 432.500.000,-
- Biaya Perkara APB dan APS	Rp. 374.000,-
- Uang Rampasan	Rp. -----,-
- Denda Tipiring	Rp. 211.353.000,-
- <u>Biaya Perkara Tipiring</u>	<u>Rp. 485.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.861.038.000,-

3) Dari jumlah perkara Tindak Pidana Umum yang ditangani Bagian Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum telah berhasil menyelesaikan beberapa perkara penting atau yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat, yaitu Perkara perlindungan anak yang mengakibatkan mati dengan pelaku anak-anak, antara lain :

- Bahwa Muzaky Wikan Dananjaya bersama-sama dengan saksi Adys Yafet Titan Setiawan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di perempatan Mirota Kampus jalan C.Simanjuntak Terban Gondokusuman Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dengan cara terdakwa Adys Yafet Titan Setiawan membonceng anak Muzaky Wikan Dananjaya di depan Mirota Kampus sebelum lampu merah, anak Muzaky Wikan Dananjaya yang mengemudikan sepeda motor berusaha mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Zakarian Al Ansyori dan korban Dwi Ramadhani Herlangga. Setelah berhasil mendekat hingga jarak sekitar 50 cm dari sebelah kiri, kemudian saksi Adys Yafet Titan Setiawan berteriak “*BAJINGAN !!!*” sambil memukul korban Dwi Ramadhani Herlangga dengan senjata tajam jenis bendo sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kiri. Bahwa akibat pemukulan dengan menggunakan senjata tajam jenis bendo oleh saksi Adys Yafet Titan Setiawan

yang pada waktu itu membonceng sepeda motor honda beat warna hitam yang dikemudikan oleh anak Muzaky Wikan Dananjaya mengakibatkan korban Dwi Ramadhani Herlangga mengalami luka bacok di bagian punggung sebelah kiri dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Revertum nomor : 021/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lipur Riyantiningtyas,Sp.F.,S.H selaku a.n Tim Pemeriksa dokter di Rumah Sakit Umum Pusat dr.Sardjito Yogyakarta tanggal 02 Juli 2018. Melanggar Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Bahwa terdakwa Nova Candra Hermawan Alias Nopek Bin Lanang Rudi Santoso pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di sungai Winongo, di Jatimulyo Rt.01 Rw.01 Kricak Tegalrejo Yogyakarta, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan cara terdakwa mengajak anak korban Agnesia Marcyliano Cantika Prana Dewi untuk cuci muka di sungai Winongo dan setelah sampai di pinggir sungai terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan tetapi anak korban tidak mau selanjutnya terdakwa memaksa membaringkan anak korban sambil mencekik leher anak korban dan karena melawan terdakwa memukul anak korban dengan tangan kanan mengenai mulut, pelipis dan jidat hingga anak korban pingsan. Selanjutnya terdakwa menyetubuhi anak korban dalam keadaan pingsan. Setelah itu timbul niat untuk membunuh anak korban dengan cara melempar anak korban ke sungai Winongo yang kedalamannya sekitar 1,5 meter. Akibat perbuatan terdakwa anak korban meninggal dunia. Melanggar Pasal 340 KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Ketiga Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3.2.4. SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Sasaran ke 6

"Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan.	Kasus Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan.	1 Kasus	2 Kasus	200 %
	Kasus Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan.	1 Perkara	-	0 %
	Perkara Tipidsus yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Tut.	4 Perkara	-	0 %
	Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penuntutan dan Tut.	4 Perkara	1 Perkara	25 %
	Pelaksanaan Eksekusi perkara Tipikor / Tipidsus Lainnya terpidana ditahan dalam dan diluar Rumah Tahanan.	2 Perkara	7 Perkara	350 %

Selama tahun 2018 Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah melakukan kegiatan Penyelidikan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebanyak 2 (dua) kasus, Penuntutan Tipikor 1 (satu) perkara, Upaya Hukum Banding 1 (satu) perkara, Kasasi 1 (satu) perkara, Eksekusi 7 (tujuh) perkara, dan 1 (satu) perkara belum dapat dieksekusi karena masih menunggu perbaikan putusan dari Mahkamah Agung RI, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Penyelidikan kasus Tipikor :
 1. Dugaan penyimpangan penggunaan dana hibahh KONI Kota Yogyakarta Tahun 2017.
 2. Dugaan penyimpangan penggunaan dana abadi KONI Kota Yogyakarta Tahun 2004.
- 2) Penuntutan perkara Tipikor :

Pemungutan liar dalam pembuatan IMB dan izin In Gang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- 3) Upaya Hukum :
 - a. Pemungutan liar dalam pembuatan IMB dan In Gang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (Upaya Hukum Banding).
 - b. Pemungutan liar dalam pembuatan IMB dan In Gang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (Upaya Hukum Kasasi).
- 4) Eksekusi Terpidana :
 - a. Widi Parwoto, A.Ma.PKB :
 - Badan : 3 bulan tgl 9 Januari 2018.
 - Biaya perkara : Rp. 5.000,- tgl 9 Januari 2018.
 - Denda : Rp. 3.000.000,- tgl 9 Januari 2018

b. Sugeng Santoso :

- Badan : 2 tahun tgl 16 Januari 2018
- Biaya perkara : Rp. 12.500,- tgl 17 Januari 2018
- Denda : Rp. 50.000.000,- tgl 25 Juni 2018
- Uang pengganti : Rp. 98.800.000,- tgl 25 Juni 2018
- Uang rampasan : Rp. 42.050.000,- tgl 16 Maret 2018

c. Henry Tahtadona :

- Badan : 2 tahun tgl 16 Januari 2018
- Biaya perkara : Rp. 12.500,- tgl 17 Januari 2018.
- Denda : Rp. 50.000.000,- tgl 22 Januari 2018.
- Uang pengganti : Rp. 101.997.353,- tgl 22 Januari 2018

d. Zainuri Masykur :

- Badan : 4 tahun tgl 16 Januari 2018
- Biaya perkara : Rp. 12.500,- tgl 17-01- 2018.

e. Suryo Widono :

- Badan : 4 tahun tgl 16 Januari 2018
- Biaya perkara : Rp. 12.500,- tgl 17 Januari 2018

f. Dra. Dwi Maryani, M.Si, Akt. :

- Badan : 1 tahun tgl 20 Februari 2018
- Biaya perkara : Rp. 10.000,- tgl 26 Februari 2018
- Denda : Rp. 50.000.000,-
- Uang pengganti : Rp. 8.737.165,- tgl 7 Maret 2018.

g. Drs. Sukamto :

- Badan : 3 tahun tgl 30 Mei 2018
- Biaya perkara : Rp. 17.500,- tgl 31 Mei 2018

3.2.5. SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Sasaran ke 7

"Meningkatnya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	Perkara Perdata & Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari (Non Litigasi)	5 Perkara	13 Perkara	260 %
	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12 Perkara	9 Perkara	75 %

Capaian Kinerja Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta selama tahun 2018, sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kerja sama (MoU) dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Instansi Pemerintah , BUMN dan BUMD, sebanyak 1 (satu) buah, yaitu dengan :
 - a. BPJS KESEHATAN Cabang Yogyakarta, dengan Nomor : B-01/O.4.10/GS/02 /2017 dan Nomor : 580/H.01.H4/FH/I/2017
- 2) Surat Kuasa Khusus (SKK) meliputi perkara Litigasi dan Non Litigasi meliputi :
 - a. SKK Litigasi ada 5 (lima) perkara, yaitu :
 1. Mewakili Kejaksaan Negeri Yogyakarta. SKK Nomor : 02/0.4.10/Gs.2/02 /2018 tgl 13 Februari 2018.
 2. Mewakili Wali Kota Yogyakarta SKK Nomor : 04 /O.4.10/Gs.2/03/2018 tgl 20 Maret 2018.
 3. Mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan nomor SKK : 05/O.4.10/Gs.2/03/2018 tgl 20 Maret 2018.
 4. Mewakili Dinas Perindustrian dengan SKK nomor : 09/O.4.10/Gs.2/03/2018 tgl 20 Maret 2018.
 5. Mewakili Walikota Kota Yogyakarta dengan SKK nomor : 11/O.4.10/Gs.2/06 /2018 tgl 6 Juni 2018.
 - b. SKK Non Litigasi ada 13 (tiga belas) perkara, yaitu :
 - PDAM Tirta Marta Yogya terdiri 10 (sepuluh) SKK :
 1. No : 01/O.4.10/Gs.2/01/2018 dan No : 690/104 tanggal 22 Januari 2018.
 2. No : 03/O.4.10/Gs.2/02/2018 dan No: 690/332 Tanggal 28 Februari 2018.
 3. No : 06/O.4.10/Gs.2/03/2018 dan No: 690/508 Tanggal 27 Maret 2018.
 4. No : 08/O.4.10/Gs.2/04/2018 dan No : 690/667 Tanggal 25 April 2018.
 5. No : 10/O.4.10/Gs.2/05/2018 dan No : 690/805 Tanggal 28 Mei 2018.
 6. No : 13/O.4.10/Gs.2/07/2018 dan No : 690/Tanggal 16 Juli 2018.
 7. No : 14/O.4.10/Gs.2/10/2018 . Tanggal 9 Oktober 2017.
 8. No : 15/O.4.10/Gs.2/10/2018 dan No : 690/1571 Tanggal 9 Oktober 2018.
 9. No : 17/O.4.10/Gs.2/11/2018 dan No : 690/1868 Tanggal 19 November 2018.
 10. No : 18/O.4.10/Gs.2/12/2018 dan No : 690/2082 Tanggal 18 Desember 2018.
 - BPJS Kota Yogyakarta terdiri 3 (tiga) SKK :
 11. No: 7/O.4.10/Gs.2/04/2018 dan No: SKK/371/042018 Tanggal 12 April 2018
 12. No: 12/O.4.10/Gs.2/06/2018 dan No: SKK/373/062018 Tanggal 21 Juni 2018
 13. No : 16/O.4.10/Gs.2/11/2018 dan No: 1711/VI-08/1118 Tanggal 7 November 2018.
- 3) Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis sejumlah 9 (sembilan) Perkara. Yaitu :
 1. Print : 01/O.4.10/Gp.2/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 kpd Teti Astuti, SE.
 2. Print : 208/O.4.10/Gp.2/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 kpd Suprpto.

3. Print : 349/O.4.10/Gp.2/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 kpd Laela Fitri Hapsari.
4. Print : 560/O.4.10/Gp.2/04/2018 tanggal 02 April 2018 kpd Endang Susilowati.
5. Print : 738/O.4.10/Gp.2/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 kpd Thomas Prasetyo U.
6. Print : 1101/O.4.10/Gp.2/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 kpd Kristiani.
7. Print : 1301/O.4.10/Gp.2/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 kpd Thomas Halilintarto.
8. Print : 1637/O.4.10/Gp.2/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 kpd Daryani.
9. Print : 1973/O.4.10/Gp.2/12/2018 tanggal 3 Desember 2018 kpd Tarsisius Cahyo Filiantoro.

3.2.6. SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI dan BARANG RAMPASAN

Capaian Kinerja Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta selama tahun 2018, sebagai berikut :

1. Penanganan dan Penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan Tahun 2008 yaitu telah melakukan pemusnahan barang bukti di halaman kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu antara lain : Heroin berat 62,2 gram, Shabu-shabu berat 315,131 gram, Ectasi Jumlah 17 Butir, Obat-obatan lainnya jumlah 27.829,5 butir, Ganja berat 3.804,10 gram, Tembakau super berat 33,24 gram, Obat-obatan tradisional tanpa ijin edar 35 dus, Miras dengan jumlah 911 boto serta, Senjata tajam 35 perkara Air Softgun 3 perkara, Air Mineral tanpa ijin edar berjumlah 332 Galon.
2. Pada Tahun 2018 Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah menyelesaikan putusan Barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dengan jumlah perkara masuk Tahun 2018 berjumlah 391 perkara, sedangkan yang sudah dieksekusi Tahun 2018 berjumlah 278 perkara.
3. Dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan telah melakukan Pemeliharaan Barang bukti yaitu terdiri dari 2 rumah, 45 kendaraan roda 2 serta 8 mobil yang kita titipkan di Rupbasan Kota Yogyakarta.
4. Dalam Tahun 2018 Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah melakukan menyetorkan Uang Rampasan Negara dengan total sekitar Rp.19.690.000,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Anggaran Belanja Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp.13.796.024.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah). Dengan realisasi belanja per akhir tahun 2018 sebesar Rp.13.208.399.035,- (tiga belas milyar dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) atau terserap sebesar 95,74 %. Dengan perincian sebagai berikut :

SUB BAG PEMBINAAN

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari	Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	27.400.000	20,679,900	75,47
			Layanan Perkantoran	11.616.204.000	11,695,472,143	100,68
Total Realisasi Belanja Program				11.643.604.000	11,716,152,043	100,62

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh Satker	Sarana dan Prasarana Kejari.			
			Pengadaan Genset	250.000.000	244.860.000	97,94
			Rehab Pagar Kantor	156.000.000	155.308.000	99,56
Total Realisasi Belanja Program				406.000.000	400.168.000	98,56

SEKSI INTELIJEN

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOS BUD Hukum dan Hankam.	Penanganan Lid/Pam/Gal di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Lid/Pam/Gal yang Dilaksanakan Baik, Kejati, Kejari Maupun Cabjari.	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen di Kejari.	13.640.000	13.316.000	97,62
			Laporan Hasil Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejari	27.900.000	27.900.000	100,00
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejari	14.500.000	-	0,00
	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri	18.920.000	16.445.000	86,92
			Kelompok masyarakat dan sekolah yang diberi penyuluhan hukum / jaksas masuk sekolah.	24.000.000	23.997.000	99,99

			Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejari	50.000.000	49,885,000	99,77
			Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	46.800.000	46,609,742	99,59
Total Realisasi Belanja Program				195.760.000	178,152,742	91,01

SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejari	140.000.000	108,399,500	77,43
			Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada Kejari	811.070.000	681,546,700	84,03
			Pengendalian penggunaan Upaya Hukum, Eksaminasi dan pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri	48.930.000	39,331,500	80,38
Total Realisasi Belanja Program				1.000.000.000	829,277,700	82,93

SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tipikor	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Kasus Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejari.	50.000.000	24.937.050	49,87
			Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejari.	100.000.000	0	0,00
			Perkara Tipidus yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	151.640.000	0	0,00
			Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	176.760.000	18.585.500	10,51
			Pelaksanaan Eksekusi perkara Tipikor / Tipidus Lainnya terpidana ditahan dalam Rutan di Kejari.	50.000.000	20.010.000	40,02
			Pelaksanaan Eksekusi perkara Tipikor / Tipidus Lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rutan di Kejari.	1.260.000	1.166.000	92,54
Total Realisasi Belanja Program				529.660.000	64,698,550	12,22

SEKSI PERDATA & TATA USAHA NEGARA

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI	%
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	Perkara Perdata & Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari (Non Litigasi)	15.000.000	15.000.000	100,00
			Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	6.000.000	4.950.000	82,50
Total Realisasi Belanja Program				21.000.000	19,950,000	95,00

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta tahun 2018 ini adalah salah satu bagian dari pertanggungjawaban Institusi Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada publik terhadap pelaksanaan tugas selama tahun 2018. Dalam Laporan ini, dijelaskan bagaimana upaya keras Kejaksaan Negeri Yogyakarta merubah dan memperbaiki diri agar dapat segera menyesuaikan diri dengan keinginan publik. Dalam Laporan ini tergambar kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai institusi pemerintahan di bidang penegakan hukum, terutama produktifitas dan profesionalisme dalam menyelesaikan perkara-perkara teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kejaksaan Negeri Yogyakarta seringkali harus berhadapan dengan opini publik yang terbentuk dari pemberitaan yang tidak berimbang. Dalam kondisi demikian, Kejaksaan Negeri Yogyakarta terus melakukan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan. Pola kerja yang lebih mengedepankan pelaksanaan secara yuridis dan tidak memihak ini terus-menerus di realisasikan pada semua jajaran.


Berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang berkaitan dengan Kinerja Kejaksaan Negeri Yogyakarta khususnya telah mengalami prosentase kenaikan secara signifikan, sehingga keberhasilannya dalam setiap pelayanan hukum dan penegakan hukum, peran serta dalam pengawasan Pembangunan, tidak terlepas dari peningkatan mutu dan disiplin kerja pegawai, profesionalisme, penyelesaian perkara secara murah, cepat dan sederhana sesuai asas-asas serta amanat undang-undang, tertib administrasi, menatausahakan sistem manajerial yang efektif dan efisien. Tentu saja Laporan ini terlalu singkat untuk menjelaskan kinerja dan upaya keras Kejaksaan Negeri Yogyakarta menjawab keinginan masyarakat pada Tahun 2018. Laporan ini juga hanya memuat sebagian kecil pelaksanaan tugas maupun keberhasilan pelaksanaannya.

4.2. Saran-Saran

1. Perlu meningkatkan sistem Kinerja Kejaksaan secara efektif dan efisien dan penempatan SDM secara proporsional sesuai mutu dan profesionalisme.
2. Perlu meningkatkan sistem penatalaksanaan / manajerial yang handal yang senantiasa memperhatikan *Strategic Managemen* untuk menerapkan SWOT Analisis (*Strengthen, Weakness, Opportunities, Treaths*) yaitu Kekuatan, kelemahan, peluang / kesempatan, ancaman sesuai visi dan misi Kejaksaan.
3. Perlu meningkatkan penerapan dan pelaksanaan penegakan hukum tepat guna dan tepat sasaran sesuai fungsi dan tata kerja Kejaksaan.
4. Berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan yang merupakan bagian dari *Intregated Criminal Justice System* atau sistem penanganan kejahatan secara terpadu dengan upayanya meningkatkan tenaga Kejaksaan secara profesionalisme, proporsional dan tertib administrasi untuk menegakkan supremasi hukum.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Yogyakarta tahun 2018 dibuat sebagai penjabaran pelaksanaan dari visi, misi, tujuan dan sasaran dengan harapan apa yang telah berhasil dicapai dan belum berhasil dicapai merupakan motivasi demi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]

UMBU LAGE WOLEKA, S.H.
Jaksa Utama Pertama NIP 19621110 198903 1 002

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

RENCANA STRATEGIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 – 2019

TUJUAN			SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengoptimalkan penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) terhadap penyelesaian perkara tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisien, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja akan lebih optimal dan juga meningkatkan penyelamatan uang Negara atas kesadaran hukum masyarakat dari hasil penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan baik secara kuantitas maupun kualitasnya serta mampu menciptakan suasana kondusif yang mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan.	Penanganan perkara tindak pidana umum secara berkualitas dan profesional	Penanganan perkara pidana sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan	Jumlah perkara dalam tahap prapenuntutan yang diselesaikan	SOP Penanganan perkara pidana sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Peningkatan Pra-penuntutan di Kejaksaan Agung.	
				Jumlah perkara dalam tahap penuntutan yang diselesaikan		Peningkatan Penuntutan di Kejaksaan Agung.	
				Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan.		Peningkatan Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi	
	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari.	SOP Penanganan perkara pidana sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri				
Penanganan perkara tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional	Penanganan perkara pidana sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penanganan perkara pidana sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, Tindak Pidana Korupsidan Perkara Pelanggaran HAM baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan	Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan	SOP Penanganan perkara pidana sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Peningkatan Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi	
				Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan		Peningkatan Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi	
Penanganan perkara tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional	Penanganan perkara pidana sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penanganan perkara pidana sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta terciptanya suatu kondisi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat	SOP Penanganan perkara pidana sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	
				Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan.		Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan	
Penanganan perkara pra penuntutan dan penuntutan tindak pidana khusus secara	Penanganan perkara pra penuntutan dan penuntutan sesuai dengan	Penanganan perkara pra penuntutan dan penuntutan sesuai dengan	Penanganan perkara pra penuntutan dan penuntutan sesuai dengan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan.	SOP Penanganan perkara pra penuntutan dan penuntutan pelanggaran sesuai petunjuk	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan	

	berkualitas dan profesional	KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	masyarakat	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penuntutan	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus			
	Penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya secara berkualitas dan profesional di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari	Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari	SOP Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari		
	Penanganan perkara pelanggaran perkara HAM berat secara berkualitas dan profesional	Penanganan perkara pelanggaran HAM berat sesuai dengan KUHP, SOP dan peraturan-peraturan yang berlaku	Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat	Jumlah perkara tindak pidana khusus (ZEE Perikanan, Kepabeanaan dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.				
				Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	SOP Penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat		
				Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan				
				Jumlah Pra penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan				
				Jumlah Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan				
				Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat				
	Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara berkualitas dan profesional	Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negaradengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayananhukum kepada pemerintah, penegakan hukum, serta penindakan hukum lain sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan	SOP Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata		
				Jumlah perkara tata usaha negara yang diselesaikan.			Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara	
				Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan			Penanganan dan Perlindungan HAK	
				Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari		Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari		
	Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan secara berkualitas dan profesional	Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yangkomprehensif dilengkapi dengan data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan	Jumlah kegiatan intelijen di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan tepat waktu yang dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung MudaIntelijen.	SOP Penanganan kegiatan intelijen dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen	Pelaksanaan Kegiatan Hukum Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Agung		
				Jumlah produksi dan sarana hasil pelaksanaan kegiatan intelijen			Pelaksanaan Kegiatan Produksi Sarana Intelijen Kejaksaan Agung	

			hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan	Jumlah kegiatan intelijen di bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan ketertiban umum tepat waktu		Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Politik di Kejaksaan Agung			
	Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka persiapan rumusan rencana kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan intelijen	Kegiatan koordinasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada		Terselesaikannya Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	SOP Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan yang dilaksanakan di Kejati, Kejari dan Cabjarisesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di, Kejati, Kejari dan Cabjari			
Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima dan meningkatkan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta kerjasama hukum yang mendukung tugas pokok dan fungsi aparatour Kejaksaan serta meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan terhadap semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta kebijakan yang telah di tentukan oleh Jaksa Agung RI, terutama dalam penegakan hukum.	Meningkatkan pelayanan penyusunan perundang-undangan dan kerjasama hukum	Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Terlaksananya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri	SOP peranan pembinaan manajemen kinerja dan administrasi keuangan, penyusun rumusan rancangan peraturan serta penelitian, pengembangan keilmuan dan kegiatan ilmiah sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pembinaan	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum			
	Terlaksananya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan PNBP	Terlaksananya kegiatan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya kualitas Pembinaan pengelolaan keuangan dan PNBP	Pembayaran gaji dan hak-hak keuangan pegawai		Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penelaahan.	Pelayanan Pengelolaan Keuangan	Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI	Penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya dan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia
				Pengelolaan keuangan, bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran serta monitoring dan bimbingan teknis penanganan perkara dalam rangka meningkatkan pengembalian asset negara hasil penanganan/penyelesaian perkara					
				Pengelolaan PNBP yang disetor ke kas negara					
		Meningkatnya penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dgn tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung	Jumlah penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya						
Terlaksananya kegiatan pengusutan, pemeriksaan atas lapdu masyarakat adanya penyimpangan, penyalahgunaan jabatan/ wewenang dan sangsi terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan	Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang	SOP peranan pengawasan dalam rangka menidakanlanjuti Lapdu untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum baik manajemen administrasi maupun pelaksanaan penanganan teknis perkara dan disiplin pegawai sesuai	Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Umum				
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		Peningkatan Pengawasan Keuangan,				

	tindakan tercela/terbukti melakukan tindak pidana			<p>dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaankeuangan</p> <p>Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti</p>	petunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan	<p>Perengkapan dan Proyek Pembangunan.</p> <p>Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum</p> <p>Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen</p> <p>Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara</p> <p>Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah</p>	
<p>Meningkatkan pelaksanaan pelaporan Kinerja secara akuntabel, transparan, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran serta akurat dan taat azas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didukung pelaksanaan operasional simkari II untuk mendukung program <i>quickwins</i> gunaPimplementasian program reformasi birokrasi dalam penyajian data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publikdalam hal penyebaran informasi dan penerimaan pengaduan masyarakat baik terkait laporan penanganan perkara atau kasus maupun pelaksanaan Kinerja aparatutur Kejaksaan.</p>	<p>Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal</p>	<p>Memberikan pelayanan publik secara profesional dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Terlaksananya kegiatan dalam penyiapan perencanaan anggaran, pengembangan manajemen, organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kejaksaan serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana kerja dan penyediaan data inventarisasi pembangunan Kejaksaan diseluruh Indonesia</p>	<p>Jumlah peraturan pembentukan satuan kerja baru</p> <p>Jumlah dokumen perencanaan yang disusun</p> <p>Jumlah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja</p>	<p>Pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mendukung tugas-tugas Kejaksaan dan informasi Kejaksaan untuk meningkatkan integritas Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI</p>	<p>Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi Dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian</p>	
			<p>Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat</p>	<p>Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal)</p>		<p>Sistem Informasi Manajemen</p>	
			<p>Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesadaran hukum masyarakat maupun penyelenggaraan Negara</p>	<p>Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.</p>		<p>Penerangan dan Penyuluhan Hukum</p>	
Meningkatkan penyelenggaraan	Meningkatkan	Pelaksanaan	Tersusunnya peraturan/dokumen	Jumlah dokumen yang terkait	Pelaksanaan	Pembinaan dan	

sistem informasi management terutama pengimplementasian, evaluasi dan pengkajian atas organisasi Kejaksaan yang telah diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan organisasi Kejaksaan dan penyempurnaan ketatalaksanaan (Business process) berdasar kan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang baru serta meningkatkan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran tunjangan kinerja atau remunerasi.	penyelenggaraan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quikwins melalui pembenahan manajemen yang berbasis teknologi informasi	penyelenggaraan ini berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku	sebagai pengimplementasian Blue Print mengenai rekrutmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat.	dengan pengimplementasian Blue Print mengenai rekrutmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat.	pembenahan program quick wins untuk akses masyarakat dan cetak biru (blue print) melalui stuktur organisasi Kejaksaan dan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana operasional Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI	Pengelolaan Kpegawai di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari			
			Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputi rekrutmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai.	Jumlah laporan manajemen kepegawaian terkait dengan rekrutmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat					
			Terlaksananya Pembinaan pengelolaan perlengkapan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan	Jumlah kegiatan pengelolaan dan pelaporan aset yang dimiliki Kejaksaan RI		Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI			
			Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Penyusunan rencana kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan					
	Meningkatkan kinerja aparatur Kejaksaan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	Tercapainya kinerja yang nyaman untuk dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda 4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum	Jumlah Pelayanan Pembayaran hak-hak Keuangan Pegawai pada Kejati, Kejari dan Cabjari		Jumlah Pelayanan Pembayaran hak-hak Keuangan Pegawai pada Kejati, Kejari dan Cabjari		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	
				Jumlah Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Jumlah Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			
				Jumlah Pelayanan Birokrasi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Jumlah Pelayanan Birokrasi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			
				Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru		Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru			
				Jumlah Rumah dinas pada satuan kerja baru yang belum dimiliki		Jumlah Rumah dinas pada satuan kerja baru yang belum dimiliki		Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	
				Jumlah pengadaan kendaraan operasional dan tahanan		Jumlah pengadaan kendaraan operasional dan tahanan			
Jumlah pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan				Jumlah pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan					
Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang direhabilitasi				Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang direhabilitasi					
Menyusun dan memperbaiki serta mengimplementasikan sistem manajemen kepegawaian guna meningkatkan SDM Kejaksaan yang berkualitas dan meningkatkan disiplin kerja serta efektifitas kerjadalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkualitas melalui Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur Kejaksaan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum	Menghasilkan aparat Kejaksaan yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran penegakan hukum dalam masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Diklat untuk menunjang peningkatan professional aparat Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional bagi aparatur Kejaksaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme.	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan dan fungsional dan jumlah peserta	Meningkatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Kepala Diklat Kejaksaan	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan			

LAMPIRAN II

RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
SUB BAG PEMBINAAN		
Pelaksanaan Koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.	1 Layanan
	Layanan perkantoran.	12 Layanan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh Satker.	Sarana dan Prasarana di Kejari (Pengadaan Genset dan Rehab Pagar Kantor).	2 Paket
SEKSI INTELIJEN		
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan yang Dilaksanakan di Kejari.	Laporan hasil kegiatan Lid/Pam/Gal kasus intelijen di Kejaksaan Negeri.	1 Laporan
	Laporan hasil kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri.	3 Laporan
	Laporan hasil kegiatan Pelacakan Aset di Kejaksaan Negeri	1 Laporan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri.	2 Kegiatan
	Kelompok masyarakat dan sekolah yang diberi penyuluhan hukum / Jaksa Masuk Sekolah.	4 Kegiatan
	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejaksaan Negeri	2 Kegiatan
	Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	6 Kegiatan
SEKSI TINDAK PIDANA UMUM		
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejari.	150 Perkara
	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada Kejari.	200 Perkara
	Pengendalian penggunaan Upaya Hukum, Eksaminasi dan pelaksanaan Eksekusi di Kejari.	200 Perkara
SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS		
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel yang Dilaksanakan Oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah.	Kasus Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejari.	1 Kasus
	Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejari.	1 Perkara
	Perkara Tipidsus yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	4 Perkara
	Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	4 Perkara
	Pelaksanaan Eksekusi perk Tipikor / Tipidsus Lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rutan di Kejari.	1 Perkara
	Pelaksanaan Eksekusi perk Tipikor / Tipidsus Lainnya terpidana ditahan dalam Rutan di Kejari.	1 Perkara
SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA		
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dilaksanakan di Daerah Baik di Kejati, Kejari Maupun Cabjari.	Terselesaiakannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri (Non Litigasi).	5 Perkara
	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis.	12 Perkara

LAMPIRAN III

PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN 2018

SUB BAG PEMBINAAN

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA		%	ANGGARAN (Rp)		%
				TARGET	REALISASI I		PAGU	REALISASI	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Kejangug, Kejati, Kejari dan Cabjari	Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100,00	27.400.000	20,679,900	75,47
			Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100,00	11.616.204.000	11,695,472,143	100,68
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh Satker	Sarana dan Prasarana di Kejari (Pengadaan Genset dan Rehab Pagar Kantor).	2 Paket	2 Paket	100,00	406.000.000	400,168,000	98,56

SEKSI INTELIJEN

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA		%	ANGGARAN (Rp)		%
				TARGET	REALISASI		PAGU	REALISASI	
Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.	Penanganan Lid/Pam/Gal di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Lid/Pam/Gal yang Dilaksanakan Baik, Kejati, Kejari Maupun Cabjari.	Laporan hasil kegiatan Lid/Pam/Gal kasus intelijen di Kejaksaan Negeri	1 Laporan	1 Laporan	100,00	13.640.000	13.316.000	97,62
			Laporan hasil kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri.	3 Laporan	3 Laporan	100,00	27.900.000	27.900.000	100,00
			Laporan hasil kegiatan Pelacakan Aset di Kejaksaan Negeri	1 Laporan	-	0,00	14.500.000	-	0,00
	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00	18.920.000	16.445.000	86,92
			Kelompok masyarakat dan sekolah yang diberi penyuluhan hukum / jaksa masuk sekolah	4 Kegiatan	8 Kegiatan	200,00	24.000.000	23.997.000	99,99
			Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00	50.000.000	49,885,000	99,77
			Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D)	6 Kegiatan	18 Kegiatan	300,00	46.800.000	46,609,742	99,59

SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA		%	ANGGARAN (Rp)		%
				TARGET	REALISASI		PAGU	REALISASI	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejari.	150 Perkara	346 Perkara	231 %	140.000.000	108,399,500	77,43
			Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada Kejari.	200 Perkara	406 Perkara	168 %	811.070.000	681,546,700	84,03
			Pengendalian penggunaan Upaya Hukum, Eksaminasi dan pelaksanaan Eksekusi di Kejari.	200 Perkara	363 Perkara	182 %	48.930.000	39,331,500	80,38

SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA		%	ANGGARAN (Rp)		%
				TARGET	REALISASI		PAGU	REALISASI	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tipikor	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Kasus Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejari.	1 Kasus	1 Kasus	100,00	50.000.000	24.937.050	49,87
			Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejari.	1 Perkara	-	0,00	100.000.000	0	0,00
			Perkara Tipidsus yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	4 Perkara	-	0,00	151.640.000	0	0,00
			Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	4 Perkara	1 Perkara	25,00	176.760.000	18.585.500	10,51
			Pelaksanaan Eksekusi perkara Tipikor / Tipidsus Lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejari.	1 Perkara	3 Perkara	300,00	50.000.000	20.010.000	40,02
			Pelaksanaan Eksekusi perkara Tipikor / Tipidsus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejari.	1 Perkara	4 Perkara	400,00	1.260.000	1.166.000	92,54

SEKSI PERDATA & TATA USAHA NEGARA

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA		%	ANGGARAN (Rp)		%
				TARGET	REALISASI		PAGU	REALISASI	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejari	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.	Perkara Perdata & Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari (Non Litigasi)	5 Perkara	13 Perkara	260,00	15.000.000	15.000.000	100,00
			Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12 Perkara	10 Perkara	75,00	6.000.000	4.950.000	82,50